

**STRATEGI DAN TANTANGAN INGGRIS PASCA MERATIFIKASI
COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE AGREEMENT FOR TRANS-
PACIFIC PARTNERSHIP (CPTPP)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

MEUTIA TASRIK

E061201100

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI DAN TANTANGAN INGGRIS PASCA
MERATIFIKASI COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE
AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (CPTPP)

N A M A : MEUTIA TASRIK

N I M : E061201100

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 08 Agustus 2024



Pembimbing I,

Prof. H. Darwis, MA, Ph.D.
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,

Aswin Baharuddin, S.IP, MA.
NIP. 198507032014041002

Mengesahkan :
Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : STRATEGI DAN TANTANGAN INGGRIS PASCA
MERATIFIKASI COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE
AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (CPTPP)

N A M A : MEUTIA TASRIK

N I M : E061201100

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 07 Agustus 2024.



Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

PERNYATAAN KEASLIAN

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meutia Tasrik

NIM : E061201100

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil pengambilalihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 13 Agustus 2024



(Meutia Tasrik)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT., Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Strategi dan Tantangan Inggris Pasca Meratifikasi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)**” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini, meskipun telah berusaha disusun dengan baik, masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dalam menyempurnakan penelitian ini sehingga menghasilkan tulisan yang lebih baik. Semoga dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti sesuai dengan bidang yang dibahas.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa dalam melewati prosesnya penulis mendapatkan dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Orang tua penulis, **Ayah Dr. Tasrik Hasrat, S.S., M.M.** dan **Ibu Chumairah, S.T.**, serta **Adik Nurqaida Tasrik** yang telah senantiasa berada di sisi penulis dalam hal apa pun. Penulis mengucapkan terima kasih atas doa, perjuangan,

serta dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis. Diucapkan juga terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis.

2. Dosen Pembimbing Skripsi, **Prof. Drs. Darwis, M.A., Ph.D.** selaku pembimbing I dan **Aswin Baharuddin, S.IP, MA** selaku pembimbing II. Terima kasih banyak atas segala bimbingan, masukan, serta bantuan yang tidak terhingga baik untuk penelitian ini dan juga sepanjang masa studi penulis.
3. Seluruh tenaga pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS; **Drs. Patrice Lumumba, MA, Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M. Si., Drs. H. Husain Abdullah, M. Si., M. Imran Hanafi, MA., M. Ec., Drs. Munjin Syafik Asy'Ari, Ishaq Rahman, S. IP., M.Si., Seniwati S. Sos, M. Hum, Ph. D., Pusparida, Syahdan, S. Sos., M. Si., Burhanuddin, S. IP., M. Si., Muhammad Nasir Badu, Ph. D, Dr. Adi Suryadi B. MA., Atika Puspita Marzaman, S. IP., MA, Nurjannah Abdullah, S. IP, MA, Aswin Baharuddin, S.IP, MA, Bama Andika Putra, S. IP., M. IR., Abdul Razaq Z. Cangara., S. IP., M. IR., Biondi Sanda Sima, S. IP., M. Sc., L. LM., dan Mashita Dewi Tidore, S. IP., MA.** Terima kasih telah memberi ilmu yang bermanfaat serta lingkungan belajar yang sehat bagi penulis dan juga mahasiswa lain.
4. Staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS, **Ibu Rahma, Pak Ridho, dan Kak Salni** yang banyak memberi bantuan terutama perihal administrasi selama masa studi penulis.

5. Terima kasih kepada partner sempro dan semhas penulis, Nur Azizah Azzahra dan **Laode Al-Aqsa Syahputra** Asman yang telah menjadi menjadi partner yang sangat baik dalam proses ujian seminar selama ini.
6. Sahabat penulis, **Cantika Venezia Wahid dan Vicha Septina Rais** yang menjadi teman penulis di awal mulai proses perkuliahan. Terima kasih telah menjadi teman penulis selama proses perkuliahan selama ini, sukses selalu.
7. Terima kasih kepada teman bimbingan penulis, **Laode Al-Aqsa Syahputra Asman** yang selama ini membantu penulis dalam teknis pembuatan skripsi dan pengurusan skripsi.
8. Grup PAN 66 yaitu **Nesa, Nathan, Wafiqa, Vicha, Al.** Kemudian, **Stenly, Ginayah, dan Atha.** Terima kasih selama ini telah menemani penulis selama masa perkuliahan.
9. Teman-teman **Alter**a yang telah membantu selama perkuliahan. Teman-teman **KKN, Reynaldy, Zahra, Nisa, Riska, Aura, Farrel, Sherren, dan Abim** yang telah mendukung penulis selama proses KKN. Teman-teman Magang, **Soro, Revi, dan Lisna** yang telah mendukung penuli selama proses magang.

Penulis sangat bersyukur atas keberadaan segala pihak yang telah membantu penulis selama masa studi. Penulis juga ingin mengucapkan permohonan, apabila selama ini melakukan kesalahan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian. Penulis berharap dengan selesainya proses ini, menjadikan penulis pribadi yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ilmu pengetahuan.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kebijakan bergabungnya Inggris ke CPTPP, serta strategi dan tantangan Inggris pasca meratifikasi CPTPP. Dengan menggunakan Teori Pilihan Rasional Kegley dan Blanton, penelitian ini berusaha menganalisis faktor yang melatarbelakangi Inggris bergabung ke CPTPP menggunakan tahapan analisis kebijakan luar negeri, antara lain: *problem recognition and definition*, *goal selection*, *identification of alternative*, dan *choice*. Penelitian ini, menghasilkan faktor yang melatarbelakangi Inggris bergabung ke CPTPP karena masalah ketidakstabilan ekonomi akibat dampak Brexit dan pandemi Covid-19 sehingga Inggris berusaha untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan menjalin hubungan baru dengan mitra baru pasca Brexit. Bergabungnya Inggris ke CPTPP dianggap sebagai kebijakan yang memiliki keuntungan maksimal dalam mencapai kepentingan negara. Strategi Inggris pasca meratifikasi CPTPP yaitu segera melaksanakan peraturan isi teks CPTPP khususnya mengenai pengurangan dan penghapusan hambatan tarif dan nontarif, serta Inggris berusaha menjalin hubungan yang lebih dalam dengan negara anggota CPTPP, selanjutnya tantangan pasca meratifikasi CPTPP yaitu terdapat kekhawatiran terkait standar pangan dan kesejahteraan hewan akibat impor kelapa sawit, peningkatan emisi gas rumah kaca, peluang ketidakadilan hasil ISDS, ketidaksesuaian ketentuan IP antara CPTPP dan paten Eropa, serta peluang ekonomi yang tidak terlalu besar. Dengan pemaparan faktor yang melatarbelakangi Inggris bergabung ke CPTPP berdasarkan tahapan proses pembuatan kebijakan luar negeri dapat memberikan pemahaman mengenai kebijakan Inggris dalam pemulihan ekonominya pasca Brexit yang lebih memilih melakukan akses untuk bergabung ke CPTPP.

Kata Kunci: Brexit, CPTPP, Indo-Pasifik, Inggris, Kebijakan Luar Negeri

ABSTRACT

This research focuses on the policy of the United Kingdom joining the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), as well as the strategies and challenges the UK faces post-ratification. Using Kegley and Blanton's Rational Choice Theory, the study analyzes the factors behind the UK's decision to join the CPTPP through the stages of foreign policy analysis: problem recognition and definition, goal selection, identification of alternatives, and choice. The research finds the UK's factors to join the CPTPP are from economic instability caused by Brexit and the COVID-19 pandemic. As a result, the UK seeks to recover economically by forming new relationships with new partners post-Brexit. Joining the CPTPP is seen as a policy with maximum benefits for achieving national interests. Post-ratification strategies by UK are implement the provisions of the CPTPP text, particularly regarding the reduction and elimination of tariff and non-tariff barriers and the UK's make efforts to deepen relationships with CPTPP member countries. The challenges post-ratification are concerns about food standards and animal welfare due to palm oil imports, increased greenhouse gas emissions, potential unfair outcomes from Investor-State Dispute Settlement (ISDS), inconsistencies between CPTPP's IP provisions and European patents, and smaller economic opportunities. By explaining the factors behind the UK's decision to join the CPTPP based on the stages of foreign policy-making, this research provides insight into the UK's policy for economic recovery post-Brexit, emphasizing its choice to accede to the CPTPP.

Keywords: Brexit, CPTPP, Indo-Pacific, UK, Foreign Policy

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
C. Kerangka Konseptual	9
Teori Pilihan Rasional dalam Kebijakan Luar Negeri	9
D. Metode Penelitian	13
1. Tipe Penelitian.....	13
2. Teknik Pengumpulan Data	13
3. Jenis Data	14
4. Teknik Analisis Data	14
5. Metode Penulisan	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Teori Pilihan Rasional dalam Kebijakan Luar Negeri	16
B. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III	38
GAMBARAN UMUM	38
A. Kebijakan Luar Negeri Inggris di Indo-Pasifik pasca Brexit.....	38
B. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)	46
C. Hubungan antara Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dengan Inggris	59
BAB IV	69
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	69

A. Faktor yang Melatarbelakangi Bergabungnya Inggris ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)	70
B. Strategi dan Tantangan Inggris Pasca Meratifikasi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).....	77
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri berdasarkan Tiga Faktor... 23

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Timeline</i> Pemberlakuan CPTPP oleh 11 Negara Anggota.....	51
Tabel 2 <i>Timeline</i> Akses Inggris ke CPTPP.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi saat ini, terutama dalam bidang ekonomi, menyebabkan semakin tingginya keterlibatan banyak negara dalam perdagangan internasional (Sunu, 2020). Perdagangan internasional dalam globalisasi ekonomi merupakan perdagangan produk dan jasa lintas batas negara, arus modal internasional, penurunan tarif dan hambatan perdagangan, migrasi, serta penyebaran teknologi yang luas dan cepat (Savrul & Incekara, 2015; Yıldız & Tosun, 2019). Perdagangan internasional mengakibatkan adanya ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan antar satu negara dengan negara lainnya (Fitrah, 2020). Akan tetapi, perdagangan internasional dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk negara maju ataupun negara berkembang dalam meningkatkan pembangunan ekonominya (Prokoso, 2009; Syofya, 2017; Dewi and Abdullah, 2023). Negara-negara di dunia berusaha untuk terlibat dalam perdagangan internasional melalui berbagai cara, baik bilateral, multilateral, maupun regional (Sunu, 2020; Dewi and Abdullah, 2023).

Dengan dukungan era perdagangan bebas, perdagangan internasional memungkinkan perdagangan dan inventaris dapat dijangkau dengan cepat dan mudah oleh semua negara dimana pun dan kapan (Dewi, 2019). Oleh karena itu, negara-negara di dunia berusaha untuk meningkatkan keterlibatannya dalam perdagangan internasional, termasuk negara maju seperti Inggris yang masih menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-6 di dunia dengan pendapatan

domestik bruto (PDB) pada tahun 2024 mencapai \$3,59 triliun (The World Bank, 2022; IMF, 2023). Meskipun dari dulu hingga sekarang keadaan perekonomian Inggris terlihat besar dan maju, hal tersebut bukan berarti Inggris tidak memiliki permasalahan ekonomi. Seperti pada tahun 1973, awal Inggris bergabung dengan Uni Eropa, terjadi krisis minyak karena situasi politik Timur Tengah, menyebabkan penurunan ekonomi dan peningkatan inflasi di Inggris (Putri, 2014; Sutrisno, 2022). Lalu, pada tahun 2008-2009, terjadi krisis ekonomi di kawasan Uni Eropa, menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dan turun sekitar 6% (Saviar, 2017). Kemudian, pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi dan keuangan global yang mengakibatkan semakin tinggi tingkat pengangguran dari 5,2% pada tahun 2008 menjadi 8,4% pada tahun 2011 (Saviar, 2017; ONS, 2022).

Keadaan perekonomian Inggris sejak 2007, kemudian terjadi krisis global tahun 2008, mengakibatkan produktivitas perekonomian, antara lain perdagangan, *foreign direct investment* (FDI), migrasi, dan nilai mata uang menjadi stagnan. Apalagi sejak dilaksanakannya referendum mengenai keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa (UE) yang dikenal dengan British Exit (Brexit) pada 23 Juni 2016, kemudian resmi keluar dari keanggotaan UE pada 31 Januari 2020 (Anshari and Rusdiyanta, 2020; Sutrisno, 2022). Kondisi perekonomian Inggris semakin diperburuk karena dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada perekonomian Inggris. Brexit dan Covid-19 dapat menimbulkan dampak ekonomi yang besar bagi Inggris, khususnya di berbagai wilayah dan industri.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan telah mengganggu produktivitas perekonomian Inggris.

Dapat dilihat pada perdagangan Inggris di awal tahun 2021, terjadi permintaan ekonomi yang meningkat lebih cepat dibandingkan persediaan dalam negeri sehingga menyebabkan kelangkaan, hambatan, dan inflasi. Total impor meningkat sementara total ekspor menurun sebelum tahun 2019 sehingga terjadi ketidakseimbangan perdagangan. Meskipun sempat membaik pada tahun 2019-2020, mulai tahun 2021-2023 nilai perdagangan kembali negatif dengan nilai impor £47,4 miliar, lebih banyak dibandingkan nilai ekspor £31,5 miliar pada tahun 2023 (Gupta et al., 2023; ONS, 2023b). Kemudian, terjadi penurunan FDI Inggris sebesar 6,4% dari 993 proyek pada tahun 2021 menjadi 929 proyek pada tahun 2022 (EY, 2023). Lalu, untuk arus migrasi setelah Brexit, menunjukkan adanya penurunan terhadap arus masuk imigran UE yang cukup besar yaitu sekitar -27% serta peningkatan arus keluar imigran UE yaitu 102% yang lebih tinggi dibandingkan dengan imigran selain negara UE (Iasio and Wahba, 2023). Selanjutnya, terjadi penurunan nilai tukar mata uang *Great Britain pound sterling* (GBP), akibat Brexit pada tahun 2016 hampir 8% terhadap dollar Amerika Serikat (AS) dan 6% terhadap Euro (Korus and Celebi, 2019). Kemudian, setelah pandemi Covid-19 di tahun 2020 terjadi fluktuasi nilai GBP selama periode tersebut (Cheng, 2023).

PDB Inggris selama tiga kuartal (Q) di tahun 2023 mengalami penurunan, antara lain Q1 yaitu 0.3%, kemudian Q2 yaitu 0%, serta Q3 yaitu -0.1% (ONS, 2023a). Dapat dilihat juga dari pertumbuhan perekonomian

Inggris melalui pertumbuhan PDB riil yang cenderung turun setelah referendum Brexit dan semakin turun dengan adanya pandemi Covid-19 di angka -11%. Meskipun sempat naik pada tahun 2021 di angka 7,6%, kembali turun di tahun setelahnya (Tudor, 2023). Pertumbuhan PDB Inggris diperkirakan akan tetap stabil, tetapi rendah di tahun mendatang (OECD, 2023). Inggris dinilai telah melewatkan pemulihan perdagangan global pada tahun 2022 setelah terjadi penurunan akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 (Du, Satoglu and Shepotylo, 2023). Oleh karena itu, Inggris berusaha melakukan strategi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Brexit dan pandemi Covid-19.

Setelah mengakhiri masa transisi keluarnya Inggris dari UE pada 31 Desember 2020, Inggris pasca Brexit telah membuat kebijakan luar negeri baru yang disebut *Global Britain* (Balls et al., 2021). *Global Britain* didasarkan pada latar belakang pandemi global, resesi ekonomi yang buruk, meningkatnya ketegangan antara AS dan Tiongkok, serta krisis iklim dan lingkungan. Selain karena adanya situasi resesi ekonomi pasca Brexit, terdapat pula pandemi Covid-19 yang menjadi perhatian Inggris di dalam *Global Britain*. *Global Britain* berdasarkan komponen *Pacific Uplift* memiliki fokus yaitu perdagangan, masalah keamanan, dan masalah lingkungan (Saddington, 2024). Dengan adanya *Global Britain*, Inggris berusaha melakukan *Free Trade Agreement* (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas Inggris yang baru pasca Brexit khususnya pada produk barang dengan berbagai negara (Balls et al., 2021). Hal tersebut berusaha dilakukan Inggris untuk membangun kembali

pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan ketahanan nasional yang lebih besar terhadap ancaman dan bahaya dunia fisik dan digital (HM Government, 2021).

Pemulihan ekonomi dapat dilakukan melalui perdagangan bebas yang salah satunya dilakukan dengan peningkatan ekspor yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hal tersebut juga dapat meningkatkan sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomiannya, antara lain sektor jasa termasuk keuangan dan jasa bisnis, serta jasa yang berfokus pada konsumen seperti ritel, makanan, minuman, dan hiburan, kemudian manufaktur, konstruksi, dan pertanian (ONS, 2016; Page, 2023). United Kingdom Export Finance (UKEF) atau lembaga kredit ekspor kelas dunia Inggris akan berusaha memperluas ketersediaan produknya untuk lebih mendukung kebutuhan keuangan eksportir Inggris dan memanfaatkan FTA baru Inggris (Department for Business & Trade and Department for International Trade, 2021).

Salah satu bidang yang menjadi fokus dari *Global Britain* yaitu perdagangan. Inggris dalam *Global Britain*, bebas dalam menentukan arah kebijakan perdagangannya yang lebih independen (Balls et al., 2021). *Global Britain* berusaha untuk menciptakan perekonomian global yang terbuka dan tangguh dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran di semua bagian Inggris dengan kebijakan perdagangan berbasis nilai untuk membuka pasar dan memperbarui aturan perdagangan internasional Inggris. Selain itu, Inggris juga berusaha untuk menjalin hubungan baru dengan mitra baru pasca Brexit (HM Government, 2021). Selanjutnya, untuk mewujudkan tujuan tersebut, Inggris

berusaha untuk menegosiasikan FTA, baik secara bilateral, regional, multilateral, maupun plurilateral. Kemudian, mengurangi hambatan perdagangan, membuka peluang bagi eksportir Inggris, mempertahankan standar tinggi, serta menghidupkan kembali hubungan dengan mitra dagang yang lama dan baru (Balls et al., 2021; HM Government, 2021).

Inggris telah menegosiasikan perjanjian perdagangan baru dengan 70 negara ditambah dengan UE (HM Government, 2022). Inggris memperdalam hubungan ekonomi dengan bagian-bagian dunia yang dinamis, seperti Indo-Pasifik, Afrika, dan negara Teluk yang termasuk dalam the Gulf Cooperation Council (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab/UEA) (Travelyan, 2022), serta menjalin perdagangan baru dengan Eropa (HM Government, 2021). Inggris telah menandatangani FTA dengan Australia, New Zealand, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), Singapura, Ukraina. Kemudian, Inggris memiliki FTA yang masih dalam proses negosiasi, antara lain dengan AS, *Atlantic Declaration*, India, Kanada, Meksiko, Israel, Switzerland, Korea Selatan. Selanjutnya, Inggris akan berusaha melakukan negosiasi FTA dengan Republik Maldives dan Turki (Webb, 2024a). Dari beberapa FTA yang telah dinegosiasikan, perjanjian yang memiliki potensi besar khususnya di bidang jasa adalah plurilateral. Perjanjian tersebut bahkan dapat memberikan keuntungan menuju multilateralisme (Balls et al., 2021). Salah satu dari perjanjian plurilateral yang telah disepakati Inggris adalah CPTPP.

CPTPP adalah blok FTA di kawasan Asia Pasifik yang memiliki 12 anggota, antara lain Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Peru, Singapura, Vietnam, termasuk Inggris. Inggris melakukan pengajuan untuk bergabung ke CPTPP pada Januari 2021. Inggris berusaha untuk menjalin hubungan dengan Indo-Pasifik melalui CPTPP karena pentingnya kawasan tersebut bagi perekonomian, keamanan, dan ambisi Inggris untuk mendukung masyarakat yang terbuka (Tudor, 2023). Kemudian, pada Maret 2023 pemerintah mengumumkan bahwa negosiasi telah selesai secara substansial. Akhirnya, 16 Juli 2023 Inggris secara resmi bergabung dengan CPTPP (Webb, 2024a). Perjanjian yang terdapat di CPTPP memiliki dua kategori, antara lain akses pasar dan aturan. Akses pasar, mencakup perdagangan barang dan jasa. Kemudian, aturan, mencakup aturan tentang investasi internasional, pengadaan pemerintah, kekayaan intelektual, lingkungan, usaha kecil dan menengah, serta pengembangan (Tudor, 2023).

Dengan melihat ketertarikan Inggris dalam melakukan FTA dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, khususnya ketika Inggris bergabung ke CPTPP, maka penulis tertarik secara lebih lanjut untuk menganalisis dan mengkaji mengenai faktor apa yang melatarbelakangi bergabungnya Inggris ke CPTPP, serta bagaimana strategi dan tantangan Inggris pasca meratifikasi CPTPP yang dibahas pada penelitian yang berjudul **“Strategi dan Tantangan Inggris Pasca Meratifikasi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).”**

A. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka fokus penelitian ini yaitu pada kebijakan luar negeri Inggris pasca Brexit yaitu *Global Britain* dibidang perdagangan dalam usaha pemulihan ekonomi dengan usaha menjalin hubungan baru dengan mitra baru khususnya Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Inggris berusaha untuk menjalin hubungan dengan mitra baru khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, berdasarkan uraian batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Faktor apa yang melatarbelakangi bergabungnya Inggris ke CPTPP?
2. Bagaimana strategi dan tantangan Inggris pasca meratifikasi CPTPP?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi bergabungnya Inggris ke CPTPP
2. Untuk mengkaji strategi dan tantangan Inggris pasca meratifikasi CPTPP

Adapun berdasarkan tujuan di atas, secara khusus diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Sebagai sumber informasi yang dapat memberikan kontribusi dan diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, ataupun peneliti Ilmu Hubungan Internasional, pada studi kajian kebijakan luar negeri.

2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan pertimbangan bagi setiap pihak, baik pihak swasta maupun pihak pemerintah sebagai aktor hubungan internasional, agar dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan luar negeri.

C. Kerangka Konseptual



Teori Pilihan Rasional dalam Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri atau *Foreign Policy* merupakan keputusan yang diambil oleh pengambil kebijakan yang dapat memengaruhi perilaku suatu negara dalam dunia internasional (Arisca, 2018). Adapun beberapa faktor dalam pengambilan kebijakan luar negeri, antara lain memperhitungkan mengenai

kekuatan dan kapabilitas negara, prinsip-prinsip yang diyakini negara, tujuan spesifik dari kepentingan nasional negara, dan sebagainya. Kebijakan luar negeri suatu negara sangat berkaitan dengan tujuan politik luar negeri suatu negara dan kepentingan nasional negara yang berusaha ingin diwujudkan oleh masing-masing negara sehingga terciptanya interaksi dengan negara lain (Bakry, 2017).

Kebijakan luar negeri suatu negara sangat penting untuk negara dalam menentukan tujuan dan arah kebijakannya yang pada akhirnya memberikan implikasi sendiri kepada negaranya. Salah satu teori dari kebijakan luar negeri yang dapat digunakan dalam menjelaskan fenomena yang sedang penulis teliti adalah Teori Pilihan Rasional atau *Rational Choice* milik Charles W. Kegley JR dan Shannon L. Blanton dalam buku mereka yang berjudul “*World Politic: Trend and Transformation*” pada tahun 2011 (Sari, 2017).

Teori Pilihan Rasional atau *Rational Choice* adalah suatu teori yang menggunakan negara sebagai aktor rasional. Negara dalam hal ini akan menentukan pilihan yang ada dengan melakukan *cost and benefit calculation* atau kalkulasi untung dan rugi. Penentuan pilihan dilakukan dengan hati-hati, menimbang tujuan, serta mempertimbangkan seluruh alternatif untuk menentukan pilihan mana yang dapat menguntungkan negara dan meminimalisasi pilihan yang dapat merugikan negara (Sari, 2017). Pilihan rasional merupakan salah satu teori yang digunakan para aktor untuk menentukan pilihan optimal dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

Menurut Teori Pilihan rasional milik Charles W. Kegley JR dan Shannon L. Blanton (2011), dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, terdapat beberapa tahapan (Sari, 2017; Hamira, 2023), antara lain:

1) *Problem Recognition and Definition*

Pada tahapan ini, pembuat kebijakan melakukan identifikasi dan klasifikasi secara spesifik dan jelas mengenai permasalahan yang sedang dihadapi suatu negara. Hal tersebut dilakukan, agar para pembuat kebijakan dapat mengambil tindakan yang secukupnya dalam menangani permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, pada tahap ini para pembuat kebijakan, dapat mengidentifikasi dan menentukan karakteristik permasalahan dengan mencari keseluruhan informasi secara lengkap.

2) *Goal Selection*

Setelah para pembuat kebijakan mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi negara, tahapan selanjutnya yang dilakukan yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan didasarkan kepada kepentingan negara. Para pembuat kebijakan dapat menentukan tujuan dengan melakukan identifikasi dan proses pengurutan dalam bentuk hierarki (berjenjang) mulai dari pilihan yang dianggap memiliki keuntungan paling maksimal hingga keuntungan paling minimal. Urutan tersebut diidentifikasi berdasarkan nilai komponen penting, seperti keamanan, ekonomi, dsb. Pilihan yang akhirnya diambil adalah pilihan dengan adanya kemungkinan keberhasilan. Dalam tahapan ini, setelah menentukan tujuan, para pembuat kebijakan akan menentukan solusi dari

permasalahan tersebut berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Solusi yang telah ditentukan nantinya akan menjadi kebijakan yang ditetapkan oleh negara.

3) *Identification of Alternative*

Setelah para pembuat kebijakan menentukan tujuan, tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu menentukan beberapa pilihan alternatif dari kebijakan yang dibuat. Beberapa pilihan alternatif tersebut diurutkan dan dikalkulasikan berdasarkan peluang keuntungan dan kerugiannya. Alternatif kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang meskipun tidak terlalu menguntungkan, tetapi tetap dapat mendapatkan kepentingan minimum sehingga negara tidak mendapatkan kerugian yang lebih besar. Alternatif kebijakan yang ada diharapkan mampu mengubah permasalahan yang terjadi menjadi keadaan di masa depan yang lebih baik. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan negara seperti keamanan, ekonomi, kedaulatan, dan aspek penting lainnya. Para pembuat kebijakan diharapkan dapat mengidentifikasi kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya dapat memenuhi kepentingan negara.

4) *Choice*

Setelah para pembuat kebijakan mengidentifikasi dan memperhitungkan untung dan rugi dari setiap alternatif kebijakan, selanjutnya dilakukan penentuan kebijakan akhir yang memiliki keuntungan maksimal dalam mencapai kepentingan negara. Pada bagian ini, para pembuat kebijakan diharapkan dapat membuat analisis secara akurat mengenai prediksi peluang keuntungan dan kerugian dari masing-masing pilihan. Terdapat rujukan standar

yang dapat digunakan bagi para pembuat kebijakan untuk menentukan pilihan yaitu memilih pilihan yang *gap* atau jaraknya paling dekat dengan tujuan akhir. Artinya pilihan tersebut yang dianggap paling rasional dan dapat memberikan keuntungan untuk negara.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan deskripsi dan interpretasi yang cenderung berfokus pada bagaimana perbedaan subjek dalam memandang realitas sosial (Hancock, 2002). Penulis dalam penelitian ini, menganalisis faktor apa saja yang melatarbelakangi pengambilan keputusan bergabungnya Inggris ke CPTPP, serta mengkaji kemungkinan strategi dan tantangan Inggris pasca meratifikasi CPTPP.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* atau studi pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka tidak hanya menggunakan satu sumber saja, tetapi menggunakan sumber dari berbagai dokumen dan informasi faktual, pendapat pribadi atau pendapat para ahli yang berasal dari buku, jurnal, artikel, sumber *online*, dan dokumen (Mann, 2015; Nur Amalia, 2023). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data tersebut, penulis mengumpulkan bahan bacaan yang berasal dari berbagai sumber resmi. Selanjutnya, menyeleksi bahan

bacaan yang sesuai dengan penelitian untuk kemudian diolah dan diaplikasikan dalam penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder mencakup data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan dipertimbangkan untuk digunakan kembali untuk tujuan yang lain dari sebelumnya (Martins, Cunha and Serra, 2018). Data sekunder bisa didapatkan melalui buku, artikel jurnal, berita dan dokumen yang berasal dari *website* resmi, serta informasi kredibel lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif mengolah data mentah dengan cara mencari, mengevaluasi, mengenali, menguraikan, memetakan, mengeksplorasi, dan menggambarkan pola, tren, tema, dan kategori. Kemudian, akan menghasilkan data yang kontekstual, subjektif, dan rinci (Ngulube, 2015). Dengan teknik analisis kualitatif, penulis memaparkan realitas dari penelitian berdasarkan analisis sumber data yang telah dikumpulkan, kemudian mengkaji dan mengaitkan teori dengan paparan penelitian untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode penulisan deduktif akan menjelaskan fenomena dari umum ke khusus. Metode tersebut dimulai dengan generalisasi, kemudian berusaha untuk

melihat apakah generalisasi ini berlaku untuk fenomena tertentu (Hyde, 2000). Dengan menggunakan metode tersebut, penulis dalam penelitian ini menjelaskan terlebih dahulu fenomena secara umum. Selanjutnya, memaparkan rumusan masalah dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan sesuai dengan hasil analisis data dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini, dipaparkan mengenai tinjauan yang digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini, yaitu Teori Pilihan Nasional sebagai salah satu teori yang terdapat dalam kebijakan luar negeri. Pada bagian terakhir pada bab ini, terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

A. Teori Pilihan Rasional dalam Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri atau *Foreign Policy* adalah salah satu kajian ilmu yang memiliki cakupan yang luas dan kompleks dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Kebijakan luar negeri merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan internasional yang telah mendapat perhatian besar bagi para akademisi Ilmu Hubungan Internasional (Senadeera, 2023).

Sejarah hubungan antar negara, terutama kekuatan besar dimulai pada abad ke-20 sekitar tahun 1900 hingga 2000 (McDougall, 2024). Namun, ternyata kebijakan luar negeri sudah ada pada abad ke-18. Sekitar tahun 1600, terdapat asumsi dasar di dalam literatur, bahwa kebijakan luar negeri terjadi karena adanya batasan ruang antar negara di dalam dan luar negeri (Leira, 2019). Hubungan antar negara dalam sistem negara modern telah ada sejak perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang mencakup negara-negara besar, menengah, dan kecil. Dengan adanya interaksi antar negara tersebut memainkan peranan penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri bagi negara-negara tersebut (AS, 2018). Kemudian, sekitar tahun 1650 kebijakan luar negeri muncul dengan alasan analisis kepentingan negara yang berbeda antar negara (Leira, 2019).

Evolusi kebijakan luar negeri selanjutnya berlanjut pada abad ke-20 yang disebut sebagai kebijakan luar negeri modern dimulai setelah perjanjian Westphalia, serta berakhirnya Perang Dunia I dan II (AS, 2018; Senadeera, 2023). Studi hubungan internasional banyak mengalami perubahan di dalam politik internasional dimulai sekitar akhir tahun 1980. Kemudian, setelah runtuhnya Uni Soviet dan pecahnya Yugoslavia, menjadi tanda berakhirnya Perang Dingin. Dengan adanya hal tersebut, maka banyak negara baru yang muncul dan berkembang, menciptakan pola-pola baru dalam interaksi antar negara (Hutabarat, 2005).

Pada era ini, terjadi peningkatan sistem internasional dalam perkembangan negara-bangsa yang menciptakan keterhubungan dan interaksi antar negara-bangsa. Hal tersebut disebabkan karena terdapat proses dekolonisasi yang telah menjadikan negara menjadi entitas yang berdaulat, serta pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin mendorong hubungan antar negara (AS, 2018). Dengan adanya dorongan hubungan antar negara, memunculkan globalisasi dalam dunia modern. Globalisasi tersebut mencakup perluasan, pendalaman, dan percepatan keterhubungan global (AS, 2018). Perkembangan globalisasi memberikan kemudahan transformasi yang membuat dunia internasional seakan tanpa batas, mengakibatkan semakin meningkatnya keterkaitan serta interaksi negara-negara di dunia dalam berbagai sektor kehidupan (Senadeera, 2023). Saling ketergantungan dan globalisasi yang semakin meningkat membuat diperlukannya kebijakan luar negeri dalam menjalin hubungan antar negara.

Kebijakan luar negeri dicirikan dalam bentuk perspektif pluralitas dan pendekatan teoritis. Perspektif pluralitas dalam kebijakan luar negeri terdapat pada pendefinisian dan pemaknaan yang kompleks dan beragam (AS, 2018; Senadeera, 2023). Konsep-konsep kebijakan luar negeri yang diturunkan menurut Ilmu Hubungan Internasional memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami aktor dan motivasi mereka. Para aktor mempelajari kebijakan luar negeri dari berbagai sudut pandang (Rittberger, 2004).

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kebijakan luar negeri dalam perspektif pluralis, dibahas mengenai asal kata dari kebijakan luar negeri itu sendiri. Kebijakan luar negeri dalam Bahasa Inggris menurut kamus Merriam Webster yaitu *foreign policy*. *Foreign policy* memiliki asal kata *foreign* berarti asing yaitu konsep yang berhubungan dengan kedaulatan dan wilayah di dalam pemahaman konsep luar negeri. Kemudian, kata *policy* berarti kebijakan yang memiliki akar kata *choices* sehingga konsep *policy* yaitu pilihan keputusan untuk mencapai tujuan (Merriam Webster, no date; Mochamad Yani, 2007). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *foreign policy* adalah pilihan cara yang dilakukan untuk melakukan tindakan yang bertujuan ke luar wilayah suatu negara (Mochamad Yani, 2007).

Dalam perspektif pluralis, kita dapat melihat kebijakan luar negeri dalam berbagai pendapat para ahli, seperti menurut Rosenau (1974), kebijakan luar negeri adalah sebuah tindakan yang tidak terlepas dari otoritas yang diambil dari internal negara, serta keadaan eksternal yang berkomitmen untuk mempertahankan aspek-aspek yang diinginkan dan mengubah aspek-aspek yang tidak diinginkan dalam dunia internasional (Dugis, 2007; Setiawan and Sulastri, 2017).

Kemudian, menurut KJ. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tanggapan aktif suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam memenuhi kepentingan nasional negara tersebut. KJ. Holsti juga memaparkan, terdapat tiga perspektif dalam menjelaskan kebijakan luar negeri, antara lain kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi, seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak, serta bentuk perilaku atau aksi (Setiawan and Sulastri, 2017).

Lalu, menurut Kegley dan Wittkopf (2011), kebijakan luar negeri sebagai *“decisions governing authorities make to realize international goals”* artinya kebijakan akan berdasarkan pada tujuan dan kepentingan nasional yang dilakukan oleh pemerintah negara dalam dunia internasional (Wardana and Putranti, 2021; Lumbantoruan, 2023). Dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara diperlukan poin penting dan nilai dasar yang mendasari perumusan tujuan, serta perlu memperhatikan alat untuk mencapai tujuan negara (Setiawan and Sulastri, 2017; Wardana and Putranti, 2021).

Jadi, kebijakan luar negeri merupakan keputusan yang diambil oleh pengambil kebijakan yang dapat memengaruhi perilaku suatu negara dalam dunia internasional. Secara umum terdapat faktor yang dapat diperhatikan dalam pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu kekuatan dan kapabilitas negara, prinsip-prinsip yang diyakini negara, tujuan spesifik dari kepentingan nasional negara, dan sebagainya (Bakry, 2017).

Selanjutnya, pendekatan teoritis dalam kebijakan luar negeri merupakan upaya dalam menjelaskan perilaku negara dalam sistem internasional, serta berusaha untuk menyediakan alat yang dapat digunakan untuk menganalisis dan

memahami pengambilan kebijakan luar negeri (Senadeera, 2023). Beberapa pemikiran mendasar yang biasa digunakan dalam memahami kebijakan luar negeri, antara lain realisme, liberalisme, dan konstruktivisme (Muzakki, 2017; Senadeera, 2023).

Pertama, pendekatan realisme merupakan pendekatan fundamental hubungan internasional dalam kebijakan luar negeri. Aktor utama yang memegang peranan kunci dalam arena politik menurut pendekatan realisme adalah negara yang memiliki perilaku untuk selalu berusaha memaksimalkan kekuasaan dan keamanan di dalam tatanan global. Sistem internasional dalam pendekatan ini, bersifat anarki, yaitu menggunakan kekuatan militer dan ekonomi dalam mewujudkan kepentingan. Selain itu, sistem internasional bersifat rasional karena alasan utama suatu negara melakukan suatu tindakan yaitu untuk memaksimalkan kepentingan nasionalnya (Muzakki, 2017; Senadeera, 2023).

Kedua, pendekatan liberalisme, berpendapat mengenai pentingnya dibentuk suatu institusi, norma, aturan, dan nilai dalam mengatur perilaku negara. Negara-negara sebagai aktor utama dalam pendekatan liberalisme bekerja sama dalam mencapai kepentingan melalui lembaga atau organisasi internasional, seperti PBB, World Trade Organization (WTO), dsb.

Ketiga, pendekatan konstruktivisme, menekankan mengenai pentingnya peranan ide dan norma dalam membentuk kebijakan luar negeri. Kepentingan negara dalam mencapai tujuannya tidak tetap, tetapi dibentuk berdasarkan norma-norma dan kepercayaan sosial. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan luar negeri

menurut pendekatan ini sangat menekankan pada pentingnya ide, norma, dan wacana (Muzakki, 2017; Senadeera, 2023).

Kebijakan luar negeri dalam Ilmu Hubungan Internasional mengkaji pola pengambilan keputusan semua aktor transnasional, seperti individu, kelompok, negara, dan organisasi internasional (Blanton and Kegley, 2017). Dalam perkembangannya, kebijakan luar negeri memiliki beberapa cakupan bidang dari berbagai disiplin ilmu, seperti Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Sejarah, dan Ekonomi, serta Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Publik, dan studi Keamanan. Kebijakan luar negeri berupaya mengeksplorasi bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain dan/atau aktor nonnegara dalam sistem internasional (Setiawan and Sulastri, 2017; Senadeera, 2023). Kebijakan luar negeri sangat berkaitan dengan tujuan politik luar negeri dan kepentingan nasional negara yang berusaha ingin diwujudkan oleh masing-masing negara sehingga terciptanya interaksi dengan negara lain (Tamm and Snidal, 2013). Kebijakan luar negeri suatu negara sangat penting untuk negara dalam menentukan tujuan dan arah kebijakannya yang pada akhirnya memberikan implikasi sendiri kepada negaranya.

Kebijakan luar negeri merupakan kajian kompleks yang membahas mengenai tiga variabel utama sebagai faktor dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, yaitu faktor eksternal atau internasional dan internal atau domestik, serta aktor pengambil keputusan (Blanton and Kegley, 2017). Pertama, faktor eksternal atau internasional dalam kebijakan luar negeri merupakan faktor yang memengaruhi interaksi yang terjadi pada tingkat internasional antara suatu negara dengan negara lainnya. Berikut beberapa faktor eksternal yang dapat memengaruhi

kebijakan luar negeri, antara lain struktur sistem internasional, hukum internasional, organisasi internasional, aliansi, kekuatan militer, serta geografi.

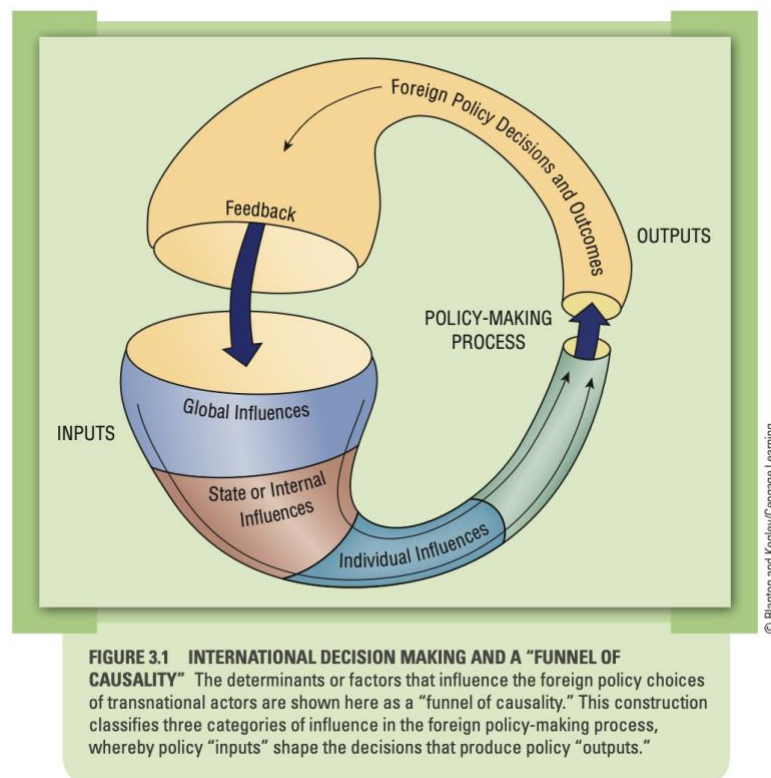
Kedua, faktor internal atau domestik dalam kebijakan luar negeri merupakan faktor yang memengaruhi suatu negara dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Berikut beberapa faktor internal yang dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, antara lain sejarah, budaya, lingkungan geopolitik suatu negara, sosial ekonomi dan rezim politik, serta aturan pengambilan keputusan dan ciri-ciri pengambilan keputusan (AS, 2018; Senadeera, 2023). Faktor eksternal dan internal merupakan dua faktor yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan dalam kebijakan luar negeri atau disebut dengan intermestik (Setiawan and Sulastri, 2017).

Ketiga, aktor pengambil keputusan diperlukan dalam kebijakan luar negeri dalam melakukan hubungan antar negara. Aktor pengambil keputusan harus memiliki kemampuan dalam menentukan sasaran, strategi, metode, panduan, dan arahan dalam pengambilan keputusan. Selain interaksi antar negara, terdapat pula interaksi dengan aktor nonnegara seperti organisasi internasional. Aktor nonnegara dalam perkembangannya semakin penting dalam kebijakan luar negeri, bahkan aktor nonnegara memiliki kekuatan dalam menetralkan pelaksanaan kebijakan luar negeri antar aktor negara. Aktor nonnegara saat ini, berkembang pesat dalam segi jumlah, antara lain pada tahun 2003 jumlah International Governmental Organizations (IGOs) mencapai 243, serta International non-Governmental Organizations (INGOs) mencapai 28.775 (Setiawan and Sulastri, 2017). Kemudian,

pada saat ini IGOs berkembang jumlahnya mencapai lebih dari 250 dan INGOs mencapai sekitar 60.000 (Mingst, 2024).

Terdapat kerangka kerja proses pembuatan kebijakan luar negeri yang dapat menjelaskan ketiga variabel dari faktor-faktor di atas, antara lain:

Gambar 1 Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri berdasarkan Tiga Faktor



(Sumber: Blanton, S.L. and Kegley, C.W. (2017) *World Politics: Trend and Transformation*. 2016-2017th Edition. hlm. 56)

Kerangka kerja di atas dapat menjelaskan bagaimana cara memahami fenomena latar belakang pembuatan kebijakan. Setiap kategori mencakup sejumlah faktor, yaitu bagaimana aktor pengambil keputusan sebagai salah satu faktor membuat kebijakan berdasarkan dua faktor lainnya yaitu faktor eksternal dan internal. Ketiga faktor tersebut berfungsi sebagai *input* dalam proses pembuatan

kebijakan. Kemudian, pada akhirnya mengarah pada keputusan akhir sebagai *output* kebijakan luar negeri yang akhirnya memberikan *feedback* yang selanjutnya dapat memengaruhi *input* itu sendiri. Terdapat beberapa manfaat dari kerangka kerja di atas, antara lain: Pertama, menjelaskan masa lalu dan masa depan, yaitu membantu dalam memahami keputusan masa lalu dan memprediksi bagaimana keputusan masa depan dapat dibuat. Kedua, sebagai lensa sejarah, yaitu memungkinkan untuk menganalisis kebijakan luar negeri dalam konteks historis, bukan hanya momen tertentu. Ketiga, fleksibel yaitu dapat diterapkan kepada negara dalam periode sejarah mana pun (Blanton and Kegley, 2017).

Dari seluruh penjelasan kebijakan luar negeri yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dipahami, bahwa kebijakan luar negeri sangat penting dalam Ilmu Hubungan Internasional. Terutama ketika dilihat mengenai perkembangan globalisasi yang menyebabkan semakin berkembang pesatnya hubungan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri suatu negara diperlukan, agar negara dapat mewujudkan tujuan dan kepentingan nasionalnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kebijakan luar negeri dalam menganalisis topik yang sedang diteliti. Kebijakan luar negeri dinilai sesuai dengan topik yang akan diangkat karena berkaitan dengan Kebijakan Luar Negeri Inggris yaitu *Global Britain*. *Global Britain* merupakan Kebijakan Luar Negeri Inggris yang dibentuk atas responnya terhadap Brexit. Kemudian, kita akan menganalisis mengenai salah satu bidang dalam *Global Britain* yaitu bidang perdagangan dalam usaha pemulihan ekonomi dengan menjalin hubungan baru dengan mitra baru pasca

Brexit khususnya Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Salah satu teori dari kebijakan luar negeri yang dapat digunakan dalam menjelaskan fenomena yang sedang penulis teliti adalah Teori Pilihan Rasional atau *Rational Choice* milik Charles W. Kegley JR dan Shannon L. Blanton pada tahun 2011 dalam buku mereka yang berjudul “*World Politic: Trend and Transformation.*” Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, fokus Teori Pilihan Rasional yaitu pengambilan keputusan yang berhubungan pada keilmuan sub bidang *Foreign Policy Analysis* (FPA) atau Analisis Kebijakan Luar Negeri (Alden, 2017). Teori Pilihan Rasional merupakan salah satu pendekatan utama dan salah satu model pengambilan keputusan untuk analisis kebijakan luar negeri dalam Ilmu Hubungan Internasional terutama pasca perang. Teori Pilihan Rasional digunakan untuk menganalisis isu-isu kompleks dalam politik internasional, mulai dari perang dan aliansi hingga organisasi internasional dan tata kelola global. Teori Pilihan Rasional dalam perkembangannya, bukan hanya digunakan untuk memahami perang dan perdamaian, tetapi juga digunakan untuk memahami ekonomi internasional, kerja sama antar negara, serta lembaga internasional (Tamm and Snidal, 2013).

Teori Pilihan Rasional merupakan cara untuk menganalisis bagaimana para pengambil keputusan membuat kebijakan, terutama ketika berada dalam risiko. Teori Pilihan Rasional berawal dari ekonomi dan filsafat politik, sekitar akhir tahun 1800 sampai sekitar awal tahun 1900, berusaha memahami bagaimana orang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri sambil mempertimbangkan juga

kebaikan yang lebih besar (Alden, 2017). Teori tersebut mewakili sekumpulan model yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dalam memahami dan memprediksi perilaku manusia (Tripp, 2020).

Sejak akhir Perang Dunia II kebijakan luar negeri didominasi oleh pendekatan realisme yang menganggap negara sebagai unit analisis. Kemudian, dalam pendekatan realisme tersebut telah terdapat perkembangan menjadi Pilihan Rasional yang sesuai dengan kebijakan luar negeri (de Mesquita, 2018). Teori Pilihan Rasional termasuk dalam pendekatan realisme karena dalam teori tersebut memiliki tujuan yang berfokus pada bagaimana para aktor pengambil kebijakan berusaha untuk mengejar dan memaksimalkan kekuasaan dan kepentingan nasional negaranya (Tamm and Snidal, 2013; Askari, Gordji and Park, 2019).

Teori Pilihan Rasional sebagai pendekatan realisme juga menempatkan negara sebagai aktor utama dan aktor rasional yang memegang peranan kunci dalam menentukan pilihan yang ada (Sari, 2017; Senadeera, 2023). Negara memiliki agen aktor pengambil kebijakan yaitu pemimpin politik yang melalui keputusan dan gaya kepemimpinannya dapat berdampak secara signifikan pada kebijakan luar negeri dan perilaku sebuah negara dalam dunia internasional (Blanton and Kegley, 2017). Oleh karena itu, para aktor pengambil kebijakan dalam hal ini pemimpin politik, diharapkan mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan yang baik, agar dapat menghasilkan kebijakan luar negeri yang maksimal.

Para aktor sebagai pengambil kebijakan luar negeri dalam hal ini para pemimpin politik sering kali akan mengambil pilihan yang sama, terlepas dari latar belakang mereka. Para pemimpin politik sebagai agen dari negara akan cenderung

bertindak secara rasional dan demi kepentingan mereka sendiri berusaha bersatu sebagai aktor kesatuan tunggal yaitu negara itu sendiri dengan menggunakan kerangka kerja Pilihan Rasional sebagai panduan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, negara sebagai aktor rasional disebut sebagai *state as unitary actors* (Blanton and Kegley, 2017; Ramadani and Trisni, 2019).

Teori Pilihan Rasional secara luas dapat digunakan untuk menganalisis banyak hal. Dalam analisis menggunakan Teori Pilihan Rasional, diperlukan berbagai spesifikasi empiris berdasarkan data yang berguna dalam mendukung penelitian. Hal tersebut diperlukan, agar hasil analisis dapat menghasilkan kebijakan yang efektif (Snidal, 2013). Jadi, untuk menghasilkan kebijakan luar negeri yang efektif, diperlukan kemampuan maksimal dari aktor pengambil kebijakan yang didukung dengan spesifikasi data yang lengkap.

Negara dalam menentukan pilihan yang ada, akan melakukan *cost and benefit calculation* atau kalkulasi untung dan rugi. Penentuan pilihan dilakukan dengan hati-hati, menimbang tujuan, serta mempertimbangkan seluruh alternatif untuk menentukan pilihan mana yang dapat memaksimalkan keuntungan negara dan meminimalkan kerugian negara (Sari, 2017). Pilihan rasional merupakan salah satu teori yang digunakan para aktor untuk menentukan kebijakan luar negeri yang paling optimal.

Menurut Teori Pilihan Rasional milik Charles W. Kegley JR dan Shannon L. Blanton (2011), dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, terdapat beberapa tahapan (Blanton and Kegley, 2017; Ramadani and Trisni, 2019; Hamira, 2023), antara lain:

1. *Problem Recognition and Definition*

Pada tahapan ini, pembuat kebijakan melakukan identifikasi dan klasifikasi secara spesifik dan jelas mengenai permasalahan yang sedang dihadapi suatu negara dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Termasuk mengidentifikasi dan mengenali karakteristik permasalahan dengan mengumpulkan informasi, seperti informasi yang berkaitan dengan semua faktor eksternal yang memengaruhi masalah dan memahami dampaknya, motivasi dari tindakan yang berupa kebijakan negara lain yang memberikan dampak kepada negara tersebut, kemampuan aktor lain yang terlibat, serta situasi tren secara global. Hal tersebut dilakukan, agar para pembuat kebijakan dapat mengambil tindakan yang secukupnya dalam menangani permasalahan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, pada tahap ini para pembuat kebijakan, dapat mengidentifikasi dan menentukan karakteristik permasalahan dengan mencari keseluruhan informasi secara lengkap.

Pada tahapan ini, penulis dalam penelitian ini mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah terkait kondisi perekonomian Inggris dengan mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi tersebut berdasarkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut dimulai dari referendum Brexit sampai saat ini, ditambah dengan pandemi Covid-19.

2. *Goal Selection*

Setelah para pembuat kebijakan mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi negara, tahapan selanjutnya yang dilakukan yaitu menentukan

tujuan yang ingin dicapai. Tujuan didasarkan kepada kepentingan negara. Para pembuat kebijakan dapat menentukan tujuan dengan melakukan identifikasi dan proses pengurutan dalam bentuk hierarki (berjenjang) mulai dari pilihan yang dianggap memiliki keuntungan paling maksimal hingga keuntungan paling minimal. Urutan tersebut diidentifikasi berdasarkan nilai komponen penting, seperti keamanan, ekonomi, dsb. Pilihan yang akhirnya diambil adalah pilihan dengan adanya kemungkinan keberhasilan. Dalam tahapan ini, setelah menentukan tujuan, para pembuat kebijakan akan menentukan solusi dari permasalahan tersebut berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Solusi yang telah ditentukan nantinya akan menjadi kebijakan yang ditetapkan oleh negara.

Pada tahapan ini, penulis dalam penelitian ini, mengidentifikasi tujuan yang akan dilakukan Inggris, disebabkan dari kepentingan nasionalnya yang terganggu akibat Brexit sehingga nanti dapat menjadi arahan selanjutnya dalam pembuatan solusi dari kebijakan yang dibuat dalam mengatasi permasalahan yang ada dengan berusaha melakukan pemulihan ekonomi dengan menjalin hubungan baru dengan mitra baru pasca Brexit.

3. *Identification of Alternative*

Setelah para pembuat kebijakan menentukan tujuan, tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu mempertimbangkan semua kemungkinan tindakan yang dapat menjadi alternatif. Kemudian, menentukan beberapa pilihan alternatif dari kebijakan yang akan dibuat. Beberapa pilihan alternatif tersebut diurutkan dan dikalkulasikan berdasarkan peluang keuntungan dan kerugian. Alternatif kebijakan yang diambil adalah kebijakan

yang meskipun tidak terlalu menguntungkan, tetapi tetap dapat mendapatkan kepentingan minimum sehingga negara tidak mendapatkan kerugian yang lebih besar. Alternatif kebijakan yang ada diharapkan mampu mengubah permasalahan yang terjadi menjadi keadaan di masa depan yang lebih baik. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan negara seperti keamanan, ekonomi, kedaulatan, dan aspek penting lainnya. Para pembuat kebijakan diharapkan dapat mengidentifikasi kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya dapat memenuhi kepentingan negara.

Pada tahapan ini, penulis dalam penelitian ini, menguraikan solusi dengan mengajukan beberapa alternatif pilihan dari kebijakan yang akan dibuat yang kiranya sesuai tujuan negara. Beberapa pilihan alternatif tersebut diurutkan dan dikalkulasikan berdasarkan peluang keuntungan dan kerugian. Alternatif pilihan tersebut diuraikan sebelum Inggris menentukan kebijakan luar negerinya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi akibat dampak Brexit dan Covid-19.

4. *Choice*

Setelah para pembuat kebijakan mengidentifikasi dan memperhitungkan untung dan rugi dari setiap alternatif kebijakan, selanjutnya dilakukan penentuan kebijakan akhir yang memiliki keuntungan maksimal dalam mencapai kepentingan negara. Pada bagian ini, para pembuat kebijakan diharapkan untuk dapat membuat analisis secara akurat mengenai prediksi peluang keuntungan dan kerugian dari masing-masing pilihan. Terdapat rujukan standar yang dapat digunakan bagi para pembuat kebijakan untuk

menentukan pilihan yaitu memilih pilihan yang *gap* atau jaraknya paling dekat dengan tujuan akhir. Artinya pilihan tersebut yang dianggap paling rasional dan dapat memberikan keuntungan untuk negara.

Pada tahapan ini, penulis mengamati setiap alternatif pilihan kebijakan yang ada dengan menganalisis pengambil keputusan yang dilakukan oleh para aktor dalam menentukan kebijakan akhir yang dinilai paling maksimal dalam mengatasi permasalahan yang terjadi akibat dampak Brexit dan Covid-19. Pilihan yang dipilih nantinya merupakan pilihan yang dapat memaksimalkan kepentingan negara dan meminimalkan kerugian negara.

Dari seluruh penjelasan Teori Pilihan Rasional yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dipahami, bahwa Teori Pilihan Rasional merupakan salah satu pendekatan utama dan model pengambilan keputusan yang penting dalam analisis kebijakan luar negeri. Teori Pilihan Rasional dapat digunakan untuk menganalisis latar belakang para aktor mengambil sebuah kebijakan, berdasarkan tahapan dalam proses pembuatan kebijakan yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Pilihan Rasional dalam menganalisis topik yang sedang diteliti. Teori Pilihan Rasional dinilai sesuai dengan topik yang diangkat mengenai faktor yang melatarbelakangi bergabungnya Inggris ke CPTPP. Kemudian, secara lebih mendalam teori tersebut dapat digunakan untuk membahas mengenai strategi dan tantangan Inggris pasca meratifikasi CPTPP sebagai implementasi dari pembahasan sebelumnya.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri dalam meratifikasi perjanjian internasional, serta strategi dan tantangan pasca meratifikasi perjanjian. Bagian ini, bertujuan untuk lebih memperjelas perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, serta agar dapat memperoleh referensi secara mendalam mengenai topik yang diteliti. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

Penelitian pertama merupakan penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal yang berjudul “Understanding The Canadian Foreign Policy Ratified Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) in 2018” yang ditulis oleh Faturachman Alputra S. dan Syastri Wulandari (2019). Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Kanada yang akhirnya menandatangani salah satu perjanjian perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik yaitu Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) pada tahun 2018. Langkah tersebut diambil oleh Kanada, meskipun Amerika Serikat (AS) keluar pada perjanjian sebelumnya yaitu Trans-Pacific Partnership (TPP). Kebijakan yang dilakukan Kanada ini, sesuai dengan tujuan perdagangan bebas dan hubungan investasi yang coba dibangun lebih erat di kawasan Asia Pasifik.

Keputusan Kanada untuk tetap bergabung ke CPTPP dianalisis menggunakan pendekatan Neoliberalisme milik Bileam & Veseth (2005) dan konsep Kepentingan Nasional milik Nuechterlein (1976). Pendekatan Neoliberalisme digunakan untuk melihat manfaat yang didapatkan dari kebebasan

perjanjian perdagangan. Kemudian, konsep Kepentingan Nasional digunakan untuk menganalisis kepentingan nasional Kanada khususnya pada kepentingan ekonomi Kanada yang melihat ada banyaknya manfaat bagi perekonomian Kanada ketika bergabung ke CPTPP. Apalagi setelah AS keluar dari perjanjian tersebut. Beberapa manfaat yang diperoleh Kanada, antara lain: mendiversifikasi pasar ekspornya untuk mengurangi ketergantungan signifikan terhadap pasar AS, meningkatkan dan menjaga akses pasar di Kawasan Asia Pasifik melalui penghapusan tarif perdagangan, serta Kanada sekarang dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar di Asia Pasifik karena tidak harus berbagi manfaat liberalisasi perdagangan dengan AS. Hal tersebut yang menyebabkan, akhirnya Kanada ikut bergabung ke CPTPP (Alputra and Wulandari, 2019).

Penelitian kedua merupakan penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Ratifikasi *Paris Agreement* oleh Indonesia Tahun 2016” yang ditulis oleh Grace Stella Arisca (2018). Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Agreement* pada 31 Oktober 2016. Kebijakan tersebut merupakan langkah yang diambil oleh Indonesia karena masih menjadi negara urutan ke-11 produsen karbon terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia melakukan ratifikasi dalam merespon ancaman perubahan iklim global dengan mempertahankan ambang batas suhu global dibawah 2 derajat celcius atau tepatnya pada suhu 1,5 derajat celcius.

Pada penelitian ini, faktor-faktor yang memengaruhi Indonesia meratifikasi *Paris Agreement* pada tahun 2016 dianalisis menggunakan Konsep Kebijakan Luar Negeri menggunakan *Adaptive Model* atau model adaptif milik James N. Rosenau

(1976). Melalui model Adaptif ini, suatu kebijakan diratifikasi berdasarkan atas tiga faktor, antara lain: *external change*, *structural change*, dan *leadership*. Dari keseluruhan faktor tersebut, faktor yang paling memengaruhi dalam pengambilan kebijakan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Agreement* adalah perubahan struktur pemerintah pada bagian faktor *structural change* (Arisca, 2018).

Penelitian ketiga merupakan penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi yang berjudul “Strategi Indonesia Menghadapi Ekspansi Pasar China dalam Ratifikasi Indonesia terhadap *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA)” yang ditulis oleh Vidya Manggiasih (2010). Penelitian ini membahas mengenai strategi Indonesia dalam merespon ekspansi pasar China dengan bergabung ke *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). China memberikan dampak yang sangat besar dalam segi investasi di kawasan ASEAN, terutama Indonesia. Terjadi ketidakseimbangan pada pasar domestik di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia melakukan strategi dalam penguatan daya saing.

Strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi ekspansi pasar China terkait dengan diratifikasinya *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) yang dianalisis menggunakan konsep Kepentingan Nasional, teori *Competitive Advantage*, dan teori Merkantilisme. Konsep Kepentingan Nasional digunakan untuk menganalisis strategi Indonesia dalam meratifikasi ACFTA khususnya pada potensi pasar besar yang dimiliki China bagi Indonesia, apalagi dalam hal investasi. Kemudian, teori *Competitive Advantage* digunakan untuk menganalisis strategi Indonesia dalam segi perdagangan yaitu pada kesepakatan bersama antara China dengan negara-negara ASEAN lainnya tentang penurunan ataupun penghapusan

tarif barang, serta memperkuat mutu sumber daya manusia. Selanjutnya, teori Merkantilisme digunakan untuk menganalisis strategi Indonesia dalam mengontrol kegiatan ekspor dan impor. Hal tersebut yang berusaha dilakukan Indonesia untuk menjaga eksistensinya di pasar global (Manggiasih, 2010).

Penelitian keempat merupakan penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Pengambilan Keputusan pada Kebijakan Ratifikasi *Republic of Korea-United States Free Trade Agreement* (KORUS FTA) oleh Korea Selatan pada Tahun 2012” yang ditulis oleh Yana Fitri Mawaddatan Warahmah (2017). Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Korea Selatan yang pada akhirnya meratifikasi *Republic of Korea-United States Free Trade Agreement* (KORUS FTA) pada tahun 2012 yang sempat mengalami kebuntuan meskipun telah ditandatangani sejak tahun 2007. Korea Selatan yang akhirnya baru meratifikasi KORUS FTA pada tahun 2012, menunjukkan terdapat adanya perubahan kondisi antara tahun 2007 dengan 2012.

Keputusan Korea Selatan untuk meratifikasi *Republic of Korea-United States Free Trade Agreement* (KORUS FTA) pada tahun 2012 dianalisis menggunakan Konsep Kebijakan Luar Negeri menggunakan model proses pengambilan keputusan milik William D. Coplin (1992). Pada analisis model pengambilan keputusan milik Coplin (1992) ini, terdapat tiga faktor determinan, antara lain: politik dalam negeri, kondisi ekonomi-militer, dan konteks internasional. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan situasi, tujuan, mencari alternatif, hingga akhirnya menentukan

KORUS FTA merupakan pilihan dengan risiko paling kecil adalah politik dalam negeri khususnya pada bagian *policy influencer* (Warahmah, 2017).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan mengenai kebijakan suatu negara dalam meratifikasi suatu perjanjian, terdapat kekosongan pengetahuan mengenai strategi dan tantangan suatu negara pasca meratifikasi suatu perjanjian, khususnya strategi dan tantangan Inggris pasca meratifikasi perjanjian. Tidak terdapat literatur mengenai Inggris yang meratifikasi suatu perjanjian karena Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) merupakan perjanjian pertama yang diratifikasi Inggris sejak resmi keluar dari Uni Eropa (UE) (UK Department for Business and Trade, 2023a).

Kemudian, penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas terkait dengan kebijakan luar negeri suatu negara dalam meratifikasi perjanjian internasional sering kali dianalisis dengan konsep Kepentingan Nasional, Konsep Kebijakan Luar Negeri menggunakan *Adaptive Model* dan model pengambilan keputusan, teori *Competitive Advantage*, serta teori Merkantilisme. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan konsep dan teori tersebut, pada penelitian kali ini menggunakan salah satu teori dari kebijakan luar negeri yaitu Teori Pilihan Rasional.

Penelitian ini, menganalisis dan mengkaji secara lebih lanjut mengenai strategi dan tantangan Inggris pasca meratifikasi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) Selain itu, dibahas juga mengenai usaha Inggris dalam melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak dari Brexit dan Covid-19 berdasarkan kebijakan luar negeri yaitu *Global Britain* dengan

fokus pada bidang perdagangan khususnya dalam meningkatkan kemakmuran, serta menjalin hubungan baru dengan mitra baru pasca Brexit.